

KEPALA OMBUDSMAN MINTA AGAR SMAN DI KOTA PALEMBANG TERIMA DAFTAR ULANG PPDB 2024 JALUR PRESTASI

Jum'at, 21 Juni 2024 - sumsel

Ampuhnews.com Palembang - Ratusan massa yang tergabung dalam gabungan aliansi aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumsel gelar aksi demo di Depan Kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) Jalan Radio kecamatan Ilur Timur I Kota Palembang, Kamis (20/6/2024) terkait penundaan siswa lulus PPDB jalur Prestasi.

Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut diantaranya, Ruben Al khatiri, Desri Nago, Rubi Indiartha, Yan Coga, Rusdiana, Sanusi, Sukma dan Nopri.

Aksi tersebut sempat berlangsung alot dan nyaris massa akan membuka paksa gerbang Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dan setelah ada titik temu terhadap tuntutan, massa membubarkan diri.

Koordinator Aksi, Ruben Al Khatiri mengatakan bahwa dalam aksi ini, mempertanyakan keputusan Ombudsman RI Perwakilan sumsel, yang menunda pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur prestasi.

"Aksi ini kami lakukan, karena Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, sudah melawati batas dan kapasitasnya, seharusnya mereka merekomendasikan dan memberi masukan, bukan memvonis seperti hakim pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun pengadilan lainnya," katanya.

Ia terangkan bahwa seharusnya Ombudsman itu perannya, jika ada masukan dan laporan dari masyarakat, ditampung, dibuat laporan dan dicarikan solusinya atau dilaporkan kepada Gubernur Sumsel, bukan memotong tali rantai yang sudah berjalan.

"Menunda daftar ulang siswa yang dinyatakan lulus dalam pengumuman PPDB melalui jalur prestasi, terkesan memperlambat majunya dunia pendidikan," ujarnya ruben.

Selain itu, Ruben juga sampaikan bahwa terkait PPDB 2024 jalur zonasi, seharusnya Ombudsman harus memberikan masukan, karena untuk jalur zonasi khususnya untuk Kota Palembang belum siap.

"Ada wilayah-wilayah yang memang belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri seperti kecamatan Seberang Ulu I (SU I), Sako dan Tanjung Barangan Kelurahan Bukit Baru, yang seharusnya ada solusinya," bebernya.

Lanjut dia berharap pada PPDB Tahun 2025 mendatang persyaratannya jangan sampai terlalu ketat, agar tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan lagi, sehingga pendidikan di Sumsel bisa berjalan baik dan kondusif.

"Alhamdulillah dalam aksi hari ini, setelah berkomunikasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan sumsel, telah mencabut pernyataannya terkait penundaan daftar ulang bagi siswa yang lulus PPDB melalui jalur prestasi," ucap Ruben.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah mengatakan bahwa masyarakat dalam undang-undang pelayanan publik, juga dijamin sebagai pengawas eksternal layanan publik untuk ikut melakukan pengawasan publik.

"Sebagai Ombudsman, kami menghargai langkah-langkah itu, karena kami butuh dukungan dari teman-teman atau masyarakat untuk ikut mengawasi kami juga dan ikut melakukan langkah korektif terkait layanan publik," katanya.

Lanjut Ia sampaikan bahwa pada, Jumat (14/6) yang lalu, pihaknya mengeluarkan release, terkait penundaan PPDB 2024, jalur prestasi khususnya untuk SMA Negeri di Kota Palembang

"Terkait dengan hal itu, sebenarnya untuk daftar ulang untuk jalur prestasi sudah selesai dilakukan yaitu 10 sampai 14 Juni 2024. Pada jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB, kami kalau tidak salah, kami mengeluarkan release tersebut," ucapnya Adrian.

Lebih lanjut Adrian beberkan bahwa dalam aksi teman-teman hari ini, meminta perpanjangan pendaftaran ulang bagi siswa yang lulus PPDB melalui jalur prestasi, karena masih banyak siswa yang lulus belum melakukan pendaftaran ulang.

"Dengan adanya pernyataan Ombudsman melalui release tersebut banyak pihak sekolah khususnya SMA di Kota Palembang tidak mau menerima pendaftaran ulang. Oleh karena itu kami tegaskan kembali kepada pihak sekolah tolong segera diterima kembali anak-anak yang mau melakukan pendaftaran ulang di jalur prestasi,"

Terakhir dia tambahkan bahwa dalam kesepakatan dengan pihak pendemo, kami juga meminta sama-sama saling menghormati proses yang sedang berjalan di Ombudsman RI perwakilan Sumsel.

"Kami sudah berjanji melalui video release kemarin, dalam satu minggu ini kami menyelesaikan pengumpulan data dan pemanggilan pihak terkait. Insyaallah Senin atau Selasa nanti akan kami release hasilnya, berupa saran korektif yang akan kami berikan kepada Dinas Pendidikan dan Pj Gubernur sumsel, saran-saran apa saja yang harus dilakukannya," pungkasnya Adrian (Zul).